



DPR Diam-diam Revisi UU MK

TANK ISRAEL TEMBAK PASUKAN SENDIRI

Gaza, MIMBAR - Tentara di tank Israel menembak pasukan sendiri di Gaza utara, Jabalia, pada Rabu (15/5). Insiden ini menyebabkan lima orang tewas. Pasukan Pertahanan Israel (IDF) menyebut peristiwa itu sebagai 'friendly fire' atau tembakan persahabatan, demikian dikutip dari Times of Israel. Menurut penyelidikan awal IDF, tank yang beroperasi bersama pasukan terjun payung menembakkan dua peluru ke gedung tempat mereka berkumpul sekitar pukul 19.00 malam.

Sebelum itu, pasukan tank telah tiba di kawasan tersebut pada pagi hari. Beberapa jam kemudian, pasukan terjun payung mencapai kawasan gedung di Jabalia dan mendirikan pos.

Sore harinya, sekelompok pasukan terjun payung lain menuju area itu dan memberi tahu dua tank di sana bahwa mereka memasuki gedung.

Pasukan tank kemudian mengidentifikasi laras senapan dari salah satu jendela gedung dan yakin itu adalah pasukan musuh, sehingga mereka menembakkan dua peluru. Tembakan itu menyebabkan lima tentara Israel tewas dan tujuh lainnya mengalami luka-luka, seperti dilaporkan dari the Times of Israel.

■ Bersambung ke Hal 11



● Para Mantan Hakim MK 'Berontak'

Jakarta, MIMBAR - Para mantan hakim Mahkamah Konstitusi (MK) ramai-ramai mengkritik revisi Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang MK yang dilakukan DPR dan pemerintah. Salah satu alasannya, pembahasan RUU itu dilakukan dalam rapat tertutup di luar masa sidang DPR.

Kritik datang dari eks Ketua MK Hamdan Zoelva. Ia menganggap RUU MK jadi ancaman terhadap status Indonesia sebagai negara hukum lantaran independensi para hakim MK bisa hilang. "Salah satu pondasi pokok negara hukum adalah independensi dari negara peradilan. Kalau lembaga peradilan kehilangan independensinya, maka tamatlah riwayat negara hukum itu," kata Hamdan dalam diskusi yang digelar PSHK, Kamis (16/5). Hamdan menjelaskan, pintu masuk

ancaman terhadap independensi peradilan tak melulu soal kebiri kewenangan lembaga. Namun, juga bisa masuk melalui rekrutmen yang tak profesional hingga masa jabatan hakim yang kerap diatak-atik.

Ia menyoroti persoalan utama dalam revisi UU MK adalah masa jabatan dan pengawasan hakim. Dalam draf RUU MK, masa jabatan hakim ditentukan maksimal 10 tahun.

■ Bersambung ke Hal 11

Mahfud MD: 3 Hakim Bisa Langsung Diberhentikan

MANTAN Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD menilai sejumlah hakim konstitusi bisa mendadak diberhentikan lembaga pengusulnya jika RUU MK disahkan.

Sejumlah hakim yang dimaksud Wakil Ketua MK Saldi Isra dan Juru Bicara Hakim MK Enny Nurbaningsih yang datang dari lembaga pengusul Presiden, serta Ketua MK Suhartoyo yang datang dari lembaga pengusul MA.

Oleh sebab itu, Mahfud mengaku saat menjabat Menko Polhukam dalam kabinet pemerintahan Jokowi, dirinya menolak pembahasan RUU itu karena dikhawatirkan mengganggu independensi hakim jelang Pilpres 2024.

"Saya menolak pengesahan RUU MK itu, terutama terkait peraturan peralihan pasal 87, karena waktu itu isinya menurut saya tidak umum. Yang umum itu kalau ada aturan baru, yang sudah ada itu dianggap sah sampai selesainya



masa tugas," kata Mahfud dalam keterangan video yang disiarkan via fitur reel Instagram miliknya, dikutip Rabu (15/5).

■ Bersambung ke Hal 11

Kasus Rumah Jabatan

KPK Cecar Sekjen DPR

Jakarta, MIMBAR - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencecar Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar soal dugaan pihak vendor yang mendapatkan keuntungan sepihak dalam proyek rumah jabatan DPR yang berujung korupsi.

Indra hadir diperiksa dalam kapasitas sebagai saksi di kasus dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di DPR RI, Rabu (15/5).

"Dikonfirmasi pula dugaan adanya pihak vendor yang mendapatkan keuntungan secara melawan hukum dalam pengadaan barang dan jasa di DPR," kata Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri dalam keterangan tertulis, Kamis (16/5).

Ali

mengatakan, dalam pemeriksaan itu, penyidik juga mengonfirmasi antara kaitan jabatan dan tugas Indra selaku Sekjen DPR RI.

Sebelumnya, usai pemeriksaan Indra

mengaku sudah menyampaikan semua fakta yang diketahuinya.

"Ya sebagai warga negara yang baik saya sudah memenuhi panggilan dari penyidik KPK dan hari ini intinya sudah saya sampaikan semua pengetahuan saya tentang fakta-fakta yang saya ketahui, dan saya

berkeyakinan penyidik KPK akan bekerja secara profesional," ujar Indra di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu.

■ Bersambung ke Hal 11



Buntut UKT Melambung

Mahasiswa Geruduk DPR

Jakarta, MIMBAR - Politikus DPR didesak menegur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbudristek) buntut melambungnya uang kuliah tunggal (UKT) di perguruan tinggi negeri berbadan hukum (PTNBH).

Tuntutan tersebut disampaikan sejumlah mahasiswa dari berbagai

universitas yang menggeruduk Gedung DPR RI, Kamis (16/5).

Pantauan wartawan di ruang Komisi X DPR RI, Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, para mahasiswa diterima oleh Wakil Ketua Komisi X DPR RI Abdul Fikri Faqih.

■ Bersambung ke Hal 11

Polemik UKT

Rektor USU dan Mahasiswa Dialog

REKTOR Universitas Sumatera Utara (USU) Prof. Dr. Muryanto Amin, S.Sos., M.Si., menggelar dialog terbuka dengan perwakilan mahasiswa yang berhimpun di Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), Kamis (16/5) sore di Gedung Digital Learning Center Building (DLCB) Biro Rektor USU Lantai 1. Dalam dialog tersebut, Rektor USU memaparkan terkait dengan penyesuaian uang kuliah tunggal (UKT) mulai dari dasar hukumnya, mekanisme dan peruntukkannya.

Rektor Prof. Muryanto Amin menjelaskan, bahwa kenaikan UKT merujuk pada Peraturan Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Permendikbudristek) No. 2 Tahun 2024. Penyesuaian UKT tak bisa dihindarkan karena ada gap/kesenjangan antara kebutuhan biaya kuliah per mahasiswa dengan sumber pendanaan yang tersedia. "Dari mana sumber pendanaan itu? Yakni di antaranya APBN, kerja sama seperti dana-dana CSR, pemanfaatan aset universitas dan masyarakat seperti UKT, hibah, beasiswa serta dana abadi.

Kesenjangan itu diperkecil dengan penyesuaian UKT yang dilakukan dengan prinsip keadilan atau orang yang mampu secara ekonomi memberikan bantuan lebih kepada yang kurang mampu," ujarnya.

Prof. Mury menekankan, kendati terdapat penyesuaian



namun USU berkomitmen dan berprinsip bahwa tidak boleh ada mahasiswa yang putus kuliah karena tidak mampu membayar UKT.

Karenanya, Rektor USU mengajak mahasiswa, khususnya BEM menjadi mitra untuk bersinergi dan berkolaborasi dalam proses verifikasi penetapan UKT yang diterapkan kepada mahasiswa baru tahun ajaran 2024.

Pada kesempatan tersebut, Rektor USU turut memaparkan alur penentuan UKT pada setiap mahasiswa kepada pengurus BEM universitas dan fakultas serta awak media yang hadir dalam dialog tersebut.

Adapun alur pertama pengisian UKT dimulai dari pengisian data serta input berkas yang

■ Bersambung ke Hal 11

Soal RUU Penyerahan

DPR Buka Ruang Diskusi

Jakarta, MIMBAR - Polemik yang dipicu oleh draf revisi Undang-undang (UU) Penyerahan lantaran dianggap bisa membungkam kebebasan pers dan hak berpendapat masyarakat, coba ditentangkan oleh Komisi I DPR RI.

Ketua Komisi I DPR, Meutya Hafid, membantah tuduhan bahwa RUU Penyerahan sengaja dibuat untuk membungkam pers.

"Tidak ada dan tidak pernah ada semangat ataupun niat dari Komisi I DPR untuk mengecilkan peran Pers," tegas Meutya dalam keterangan tertulisnya, Kamis (16/5).

Ketua DPP Partai Golkar itu menuturkan, selama ini hubungan Komisi I dengan Dewan Pers saling melengkapi dan bersinergi.

"Komisi I DPR menyadari keberlangsungan media yang sehat adalah penting," tuturnya.

■ Bersambung ke Hal 11

Jadwal Salat

9 ZULKAIDAH 1445 H

| | |
|-------------------|---------------------|
| Subuh : 04:54 WIB | Maghrib : 18:33 WIB |
| Zuhur : 12:25 WIB | Isya : 19:46 WIB |
| Ashar : 15:47 WIB | |

■ Untuk kota Medan sekitarnya

Renungan

Kebangkitan Islam Sumatera Menuju Indonesia Emas 2045

Oleh : Dr. Suheri Harahap M. Si
(Dosen FIS UIN Sumut Medan)



RESPONS kaum cendekiawan Muslim dari kampus PTKIN UIN Sumatera Utara Medan menuju kebangkitan Islam Indonesia harus lahir dari Islam Sumatera di tahun emas 2045 pemikiran berkaitan dengan bagaimana Indonesia maju itu bisa dicapai di tahun 2045 karena momentumnya pada tahun itu menjadi bekal bagi kita semua

■ Bersambung ke Hal 11

Lang Dide

- Diam-diam makan dalam ...
- Hehehe..

DPR Buka...

Dari Halaman 1

Soal draf revisi UU Penyiaran yang beredar di media sosial, menurut mantan Jurnalis ini, masih belum lengkap dan bersifat dinamis, atau dapat berubah lantaran masih belum ada pembahasan lanjutan di parlemen.

“RUU Penyiaran saat ini belum ada, yang beredar saat ini adalah draf yang mungkin muncul dalam beberapa versi dan masih amat dinamis. Sebagai draf tentu penulisannya belum sempurna dan cenderung multitafsir,” jelasnya.

Ia menambahkan, tahapan draf RUU Penyiaran saat ini masih di Badan Legislasi. Artinya, belum ada pembahasan dengan pemerintah.

“Komisi I DPR membuka ruang seluas-luasnya untuk berbagai masukan dari masyarakat,

tentu setelah jadi maka RUU akan diumumkan ke publik secara resmi,” tutupnya.

Sebagian publik menganggapi RUU Penyiaran akan membongkar kebebasan pers dan hak berpendapat masyarakat.

“Komisi I DPR telah dan akan terus membuka ruang luas bagi berbagai masukan, mendukung diskusi dan diskursus untuk RUU Penyiaran sebagai bahan masukan pembahasan RUU Penyiaran,” kata Meutya.

DPR RI lewat Panja RUU Penyiaran telah sepakat untuk mempelajari masukan terkait undang-undang tersebut.

“Rapat internal Komisi I DPR pada 15 Mei 2024 kemarin telah menyepakati agar Panja Penyiaran Komisi I DPR mempelajari kembali masukan-masukan dari masyarakat,” tutup Meutya. (rm/js)

KPK Cekar...

Dari Halaman 1

Dalam kasus ini, KPK pun sudah mencegah tujuh orang tersangka bepergian ke luar negeri selama enam bulan hingga Juli 2024.

Selain Indra, enam orang lain adalah Kepala Bagian Pengelolaan Rumah Jabatan DPR Hippi Hidupati; Direktur Utama

PT Daya Indah Dinamika Tanti Nugroho; Direktur PT Dwi-tunggal Bangun Persada Juanda Hasurungan Sidabutar.

Kemudian Direktur Operasional PT Avantgarde Production Kibun Romi; Project Manager PT Integra Indonesia cabinet Andrias Catur Prasetya; dan Edwin Budiman (swasta). (cnni/js)



Pentingnya Menjaga...

Dari Halaman 1

bagi pemerintah khususnya untuk bisa mengantarkan Indonesia maju terutama bidang pendidikan. Sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas akan meningkatkan kemajuan dan kesejahteraan terutama di Sumatera karena fondasi dari sebuah kemajuan itu adalah adanya masyarakat yang well educated, well trained, dan kemudian produktivitasnya tinggi, penganggurannya turun, kemiskinannya juga akan turun. Bagaimana data masyarakat Muslim Sumatera akan bangkit dan maju di tahun 2045?

Merujuk Islam di Sumatera tetap saja melihat sejarah Islam di Aceh. Ada beberapa kajian menyebut bahwa Islam dibawa ke Aceh dari Yaman penyebar ke Aceh Habib Teungku Djanjong. Habib ini makamnya di Aceh mesjid Djanjong Banda Aceh. Kemudian mesjid Baiturrahman di masa Kerajaan Iskandar Muda masa Belanda. Jadi Islam pertama di Aceh di Perak lewat perdagangan laut dari Arab. Makam Sultan Alaidin Said Maulana Abdul Azizah (840) masa kerajaan Perak di Aceh Timur dan pimpinan pertama Kerajaan Perak. Mesjid pertama di Pasai dan Perak tempat masuknya Islam ke Aceh. Terdapat juga Pulau Rubiah Sabang tempat pemberangkatan haji pertama Indonesia pakai kapal laut, asrama haji keberangkatan haji pakai kapal Tongkang selama 6 bulan perjalanan di masa kolonial Belanda. Terkait sejarah Islam di Sumatera dan Sumatera Utara dari titik nol Islam di Barus Tapanuli Tengah menjadi kajian yang terus menjadi perhatian ahli. Kedepan harus mendapat perhatian UIN Sumut terkait heritage Islam, tulisan sejarah Islam, penelitian tentang relasi ulama sufi Sumatera.

KEBANGKITAN ISLAM DI DAERAH MINORITAS SUMATERA

UIN Sumatera Utara perlu melakukan kajian dan penelitian akan eksistensi masyarakat Muslim dan melakukan langkah pemberdayaan umat. Misal di daerah Samosir, Karo, Nias, Simalungun, Phakpak dll. Bagaimana kontribusi Tri Dharma Perguruan Tinggi Islam, para cendekiawan Muslim mengubah mindset dan cara meningkatkan masyarakat baik di bidang dakwah, pendidikan, ekonomi termasuk sarana prasarana ibadah. Misal pengiriman da'i (ustadz), penyuluhan agama Islam dll. Misal mesjid Sigarang-garang Berastasi Desa Sigarang-garang depan Gunung Sinabung menjadi perhatian menuju kebangkitan Islam Karo. Menelusuri jejak ulama penyebar Islam di tanah Karo. Hal ini juga mengingatkan pada sejarah masa kerajaan Iskandar Muda bahwa pernah mengirim dua ulama Aceh ke Samosir (Tuk-Tuk) makamnya masih ada atas permintaan Raja Sidabutar.

Bagaimana UIN Sumut Medan mengaitkan sejarah Islam Sumatera dan mengaitkan sejarah sebagai basis ilmu pengetahuan dengan bekerjasama lintas disiplin ilmu terutama sejarawan, antropolog, sosiolog arkeolog, pemikir studi Islam mengkaji heritage Islam Sumatera yang kurang terpelihara seperti di luar negeri. Masih perlu meniru style arkeolog Amerika, Perancis dll yang datang meneliti ke Sumatera. Ada 2 tahun

arkeolog Amerika tinggal di Aceh bersama GAM. Ada peneliti Prancis datang ke Candi Bahal Portibi Padang Lawas Utara. Begitu juga cerita makam Snock Horgronce di dekat mesjid Baiturrahman Aceh memiliki peran Belanda dalam menaklukkan Aceh.

Kebangkitan Islam Sumatera perlu melihat kerjasama dengan internasional seperti peran riset dalam memperkenalkan heritage nusantara. Terlihat masih minimnya riset kampus kepada daerah Muslim minoritas. Para muallaf di daerah minoritas di Sumatera Utara seperti anak-anak Muallaf di Nias, Karo, Samosir dibawa ke pesantren ke Medan. Ternyata banyak potensi ada yang menang lomba kitab kuning sekarang di Pesantren Amplas. Anak Muallaf mestinya dapat perhatian khusus untuk gratis masuk UIN Sumut Medan bahkan tinggal di Mahad setelah tamat jadi duta peradaban sekolah ke berbagai perguruan tinggi di dunia. Akan lahir ilmuwan Muslim seperti dr. Nanta penemu salah satu urat dari Unsyiah dapat penghargaan dari Amerika.

Harus ada kebanggaan seperti negara Turki bangun pesantren di Aceh dimana anak-anak Aceh ke Turki naik pesawat Turkey Airline free donaturnya dari masyarakat Muslim Turki setelah tamat dari universitas di Turki disebar ke seluruh dunia. Begitu juga anak-anak Melayu di Malaysia yang tergabung dalam Dunia Melayu Dunia Islam (DMDI) belajar ke Inggris free ke USU anak pegawai pemerintah gratis. Penguatan jaringan ekonomi dan perdagangan bisnis di daerah penghasil bahan rempah-rempah dan peningkatan kualitas hasil tanaman masyarakat muslim berskala internasional produksi makanan dan minuman oleh para pengusaha (saudagar Aceh) terus menguasai bisnis ekspor import. Kebangkitan Islam sama dengan Kebangkitan Saudagar Muslim Sumatera dan Aceh.

Maka harus juga bangkit saudagar Karo, Melayu, Batak Angkola, Mandailing, Nias, Batak Toba, Dairi Muslim bersemangat. Masih perlu riset kampus seperti UIN Sumut Medan mengubah mindset mencerahkan Islam yang membumi dengan tradisi dimana etos Islam dan sains berjalan bersama. Antara pemerintah dan perguruan tinggi Islam saling menguatkan untuk kesejahteraan masyarakat Muslim Sumatera. Contoh apakah izin halal dari Malaysia atau dari MUJ Indonesia (Sumut) untuk mau kirim barang ke Arab (dunia) bisa ke luar negeri.

Seperti apa action plan 'Smart and Islamic University UIN Sumatera Utara Medan. Apakah kita mencontoh Aceh dimana pembangunan Syariat Islam dan menjadikan tujuan wisata internasional dengan konsep Kota Islami (Islamic City). Design pembangunan kampus Islam dan pemerintah daerahnya bersinergi menuju pembangunan berkelanjutan (sustainable development) yang islami. Apakah UIN Sumut bersinergi dengan master plan pembangunan Pemerintah Sumatera Utara dengan penguatan intervensi nilai-nilai Islam pada prioritas pembangunan dimana agama dan budaya lokal menjadi pilar pembangunan? Menguatkan moderasi beragama di masyarakat Sumatera Utara dan Smart and Islamic policy sebuah gagasan konsep pembangunan Islam. (*)

Seorang Pria Tewas Ditikam Saat Ambil Wudhu Salat Subuh

Jakbar, MIMBAR - Seorang Pria berinisial MS (71), warga Pesing Garden Kedoya Utara, Kebon Jeruk, Jakarta Barat tewas usai ditusuk oleh orang yang tidak dikenal (OTK) pada Kamis (16/5), sekitar pukul 04.30 WIB.

“Ya benar, ada seseorang yang telah ditusuk oleh orang tak dikenal hendak melaksanakan Salat Subuh,” kata Kapolsek Kebon Jeruk Polres Kopol Sutrisno saat dikonfirmasi.

Belakangan, korban yang diketahui bernama

Saidi ditusuk oleh OTK saat mengambil wudhu hendak melaksanakan Salat Subuh, di mana korban ditusuk dari belakang.

Saidi sendiri salah satu warga yang rajin menunaikan Salat Subuh.

“Usai kejadian korban langsung dibawa ke rumah sakit Graha Kedoya dan mendapatkan pertolongan oleh pihak dokter namun setelah 2 jam nyawa korban tidak tertolong,” kata Sutrisno.

Lebih jauh Kanit Reskrim Polsek Kebon Jeruk AKP Subartoyo mengatakan, dalam kasus ini, pihaknya bersama dengan Tim dari Polres Metro Jakarta Barat dan Polda Metro Jaya langsung Bergerak untuk melakukan pencarian terhadap pelaku.

“Kami juga sudah melakukan olah TKP serta mencari bukti dan melakukan pengecekan cctv maupun keterangan saksi di lokasi,” demikian Subartoyo. (rm/js)

Tank Israel...

Dari Halaman 1

Mereka yang tewas yakni Roy Beit Yaakov, Gilad Arye Boim, Daniel Chemu, Ilan Cohen, dan Betzalel David Shashuah.

Semua personel bertugas di Batalyon 202

Brigade Pasukan Terjun Payung, dan merupakan bagian dari kompi ultra-Ortodoks.

Kemudian mereka menambah jumlah korban tentara Israel yang tewas di Gaza menjadi 278 orang. Tembakan tank Israel ke tentara sendiri terjadi di tengah agresi pasukan Zionis di Gaza.

DPR Diam-diam...

reses.

Palguna juga mengaku heran DPR kerap mengatak-atik masa jabatan hakim hingga masa jabatan pimpinan MK lewat revisi UU. Baginya, revisi UU MK ini tidak signifikan untuk mewujudkan MK sebagai lembaga yang independen.

“Pertanyaan pertama muncul dari saya adalah, ‘Masih berguna enggak sih, orang-orang ahli itu diundang untuk bicara soal itu? Masih berguna kah?’. Kan mereka suka-suka saja, besok tiba-tiba sudah disahkan saja. Semacam di-court picking-kan ala Indonesia,” kata dia.

Palguna pun pesimistis hakim MK bisa independen dalam melaksanakan tugas. Ia menegaskan status Indonesia sebagai negara hukum bergantung pada MK sebagai pengawal konstitusi.

“Justru soal-soal lain yang bisa meningkatkan wibawa dan kebutuhan publik bahwa MK dibutuhkan, justru tidak pernah di-insert dalam perubahan UU MK. Apa itu? Melengkapi ketentuan hukum acara di MK. Soal impeachment presiden, lalu dalam pembubaran parpol, itu diatur dalam peraturan MK,” ucap Palguna.

Sementara itu, mantan hakim MK Wahidudin

Mahfud MD...

Sementara pada Pasal 87 RUU MK terkait mekanisme peralihan berdampak konsekuensi bagi Saldi, Enny, dan Suhartoyo untuk bisa dievaluasi sebab ketiganya sudah menjabat lebih dari lima tahun, dan kurang dari 10 tahun.

Jika tidak ditarik atau dihentikan, Suhartoyo akan memasuki masa pensiun sebagai hakim MK pada tahun depan. Sedangkan, Saldi menayakan masa jabatan hingga 2027 dan Enny hingga 2028.

Pasal 87 RUU MK menyebut hakim konstitusi yang telah menjabat selama lima tahun dan kurang dari 10 tahun hanya dapat melanjutkan masa jabatannya terhingga sejak tanggal penetapan dirinya sebagai hakim MK, dan dengan syarat disetujui lembaga pengusul.

Mahfud menilai jika lembaga pengusul masing-masing itu memutuskan Saldi, Enny, dan Suhartoyo tetap bekerja, maka itu bagian dari politik etis. “Itu bisa menjadi politik etis bagi pemerintah, untuk menunjukkan ‘bahwa kami tidak akan mecat kok, meski aturannya begitu’. Meskipun, saya tidak tahu perkembangan berikutnya [dari berlakunya RUU MK tersebut],” ujarnya.

Selain tiga hakim yang disinggung Mahfud itu, enam hakim lainnya tidak kena konsekuensi dari aturan peralihan dalam RUU MK bila disahkan jadi undang-undang.

Mahasiswa Geruduk..

Dari Halaman 1

Koordinator Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) terpilih Heryanto menuturkan, mahasiswa menyampaikan lima poin kepada anggota dewan terkait kenaikan

UKT yang tidak masuk akal.

“Kesimpulan kita hari ini ada lima poin, nanti akan disimpulkan oleh DPR RI Komisi X,” kata Heryanto usai audiensi dengan Komisi X DPR RI.

Presiden BEM Universitas Mataram ini

Rektor USU...

Dari Halaman 1

dilakukan mahasiswa pada laman registrasi.usu.ac.id. Kemudian pengisian data ekonomi mahasiswa, orangtua, dan atau wali yang membiayai di laman uktdata-reg.usu.ac.id.

Selanjutnya sistem mengeluarkan kelompok UKT berdasarkan data total penghasilan yang diisi mahasiswa dengan rumus: a) jumlah penghasilan yang bias dialokasikan untuk pembayaran UKT per semester yaitu total penghasilan x 17,5 persen x 6 bulan, apabila mahasiswa tersebut satu-satunya yang kuliah dalam satu keluarga.

Total penghasilan x 12,5% x 6 bulan, apabila mahasiswa tersebut memiliki 1 (satu) orang saudara kandung yang kuliah dalam satu keluarga. Total penghasilan x 10% x 6 bulan, apabila mahasiswa tersebut memiliki 2 (dua) orang atau lebih saudara kandung yang kuliah dalam satu keluarga. b) Sistem memilih level UKT yang paling dekat dengan jumlah alokasi penghasilan sebagaimana pada huruf a penghasilan.

Setelahnya, tim verifikasi memeriksa keaslian, keakuratan data dukungan, dan kesesuaian kelompok UKT yang ditentukan sistem. Lalu kemudian ditentukan besaran UKT setiap mahasiswa melalui rapat pleno yang diupload ke dalam sistem. Sampai di sini, mahasiswa atau orangtua kemudian mendapat informasi tentang besaran UKT yang harus dibayarkan.

“Apabila ada mahasiswa atau orangtua yang keberatan terhadap nilai UKT yang dibebankan, USU juga membuka peluang untuk banding.

Pengaduan mahasiswa atau orangtua dilakukan dengan datang langsung ke Unit Layanan Terpadu (ULT) Lantai 1 Biro Rektor USU. Akan ada petugas helpline khusus UKT yang akan membantu memberi penjelasan serta mekanisme banding,” ujarnya.

Tim verifikasi, imbuhnya, akan mengelompokkan aduan ke dalam dua kelompok. Pertama adalah aduan yang dinilai tidak layak untuk diselesaikan pada awal semester dan aduan yang harus diselesaikan segera. Pada delik aduan pertama, direkomendasikan untuk diajukan pada saat dibukan banding UKT untuk pembayaran UKT semester 3. Namun untuk yang

membutuhkan tindak lanjut segera, tim verifikasi akan mengajukan kepada rektor permohonan antara lain: reset ulang registrasi UKT, verifikasi tingkat lanjut berupa wawancara, penyampaian video profile atau verifikasi dan validasi lapangan, pleno peninjauan kembali tarif UKT, penyampaian hasil pleno kepada rektor untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor lalu upload hasil pleno/keputusan rektor pada sistem.

“Jadi USU membuka selebar-lebarnya peluang untuk banding demi asas transparansi dan berkeadilan. Meskipun demikian, ada beberapa kasus yang ditemukan orangtua atau mahasiswa banyak yang memalsukan data-datanya. Distutilah fungsi verifikasi untuk memvalidasi data agar apa yang disampaikan sesuai dengan realita di lapangan,” ujar Prof. Mury.

Sementara menampung aspirasi mahasiswa terkait adanya mahasiswa yang salah dalam penetapan UKT-nya, USU mengajak perwakilan BEM untuk berkolaborasi dan bersinergi dengan memberikan data-data mahasiswa yang merasa tidak pas nilai UKT-nya. Bahkan Rektor USU secara terbuka mengundang mahasiswa untuk menjadi volunter (relawan) verifikasi untuk mengetahui langsung bagaimana mekanisme verifikasi dilakukan.

Menanggapi isu terkait sarana dan prasarana di USU, Prof. Mury menjelaskan bahwa pembangunan USU, selama ia menjabat telah mengalami perbaikan yang signifikan. Meskipun diakui belum merata dan menyeluruh akibat dari terbatasnya sumber dana.

Rektor menegaskan, bahwa pembangunan di USU yang dilakukan secara terbuka telah mulai terlihat. Seperti di antaranya Gedung DLCD, smart classroom di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Fakultas Hukum (FH), Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB), Fakultas Pertanian (FP), Studio Arsitek berstandar internasional, taman dan pedestarian di sejumlah fakultas, laboratorium di Farmasi dan Kimia serta pembangunan gedung kemahasiswaan.

“Tidak hanya berhenti sampai di situ, USU ke depan juga akan membangun kantor pusat pelayanan dengan standar internasional, student center, Gedung TALENTA USU, UMKM Square, kantin yang nyaman dan sehat di sejumlah titik, laboratorium penelitian terpadu, Sport Science dan Hotel USU. Semua pem-

Adams berpesan kepada para hakim konstitusi yang menjabat supaya tidak takut jika UU MK hasil revisi ini digugat ke MK.

Ia menuturkan, para hakim harus berani mengedepankan independensi dan integritas ketika menghadapi berbagai gugatan di masa mendatang. “Hadapi godaan dan ancaman-ancaman di pasal-pasal ini. Ketika RUU jadi UU, jika diuji di MK ya para hakim ya harus tidak boleh takut,” kata Wahidudin.

“Tapi sekali lagi ini untuk katakan percaya diri pada integritas,” tambahya.

Pada Senin (13/5), Komisi III DPR menggelar rapat pengambilan persetujuan tingkat pertama dengan pemerintah soal revisi UU MK. Rapat digelar tertutup di luar masa sidang DPR.

Kini, RUU MK pun tinggal selangkah disahkan sebagai undang-undang dalam rapat paripurna. Total ada tiga poin revisi dalam RUU MK, yakni Pasal 23A, Pasal 27A, dan Pasal 87. Salah satu yang diatur adalah para hakim konstitusi hanya dapat melanjutkan jabatan setelah mendapat persetujuan dari lembaga pengusul yakni DPR, MA, dan pemerintah. (cnni/js)

Enam hakim itu adalah Anwar Usman dan Ridwan Mansyur berasal dari lembaga pengusul MA. Kemudian Daniel Yusmic dari lembaga pengusul Presiden. Lalu, Arief Hidayat, Arsul Sari, dan Guntur Hamzah dari lembaga pengusul DPR.

Pasalny, Anwar telah menjabat lebih dari 10 tahun yakni sejak 2011 lalu, dan akan pensiun 3 tahun lagi. Arief juga sudah lebih dari 10 tahun jadi hakim MK sejak 2013 silam dan akan pensiun dua tahun lagi.

Sisanya baru menjabat sebagai hakim MK kurang dari lima tahun yakni Daniel sejak 2020, Guntur sejak November 2022, Ridwan Mansyur sejak November 2023, Arsul pada awal tahun ini.

Sebelumnya, Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang (RUU) Komisi III DPR diam-diam menggelar rapat pengesahan tingkat satu dan menyepakati revisi UU MK perubahan keempat dibawa ke tingkat dua. Revisi UU MK kini selangkah lagi disahkan menjadi UU.

Sebenarnya, pengesahan revisi UU MK sempat ditunda lantaran menuai penolakan sejumlah pihak. Namun, kini dilanjutkan dengan memuat pasal-pasal yang dianggap problematik. Mulai dari evaluasi hakim oleh lembaga pengusul hingga memasukkan unsur perwakilan lembaga di MKMK. (cnni/js)

mengatakan, Komisi X DPR RI akan membentuk panitia kerja (Panja) UKT.

“Komisi X akan membentuk panitia panja. Untuk bagaimana mengisi dan akan memanggil Pak Nadiem (Makarim), dalam waktu dekat ini,” kata Heryanto. (rm/js)

bangunan itu diperuntukkan untuk peningkatan kualitas pembelajaran, pengabdian dan penelitian di USU. Sebab sebuah kampus dikatakan baik bila dosen dan mahasiswa memiliki kualitas yang baik. Baiknya kualitas dosen dan mahasiswa ditunjang dengan fasilitas yang memadai,” ujar Prof. Mury.

Prof. Mury pada kesempatan itu juga mengajak kepada mahasiswa untuk lebih peduli pada kualitas peningkatan soft skillnya, memberi masukan yang konstruktif serta memiliki visi ke depan untuk bersama dosen serta pimpinan fakultas serta universitas membangun sinergi demi kemajuan bersama. Karenanya, Rektor USU akan mengagendakan untuk secara rutin membuat forum rektor dengan mahasiswa setiap tiga bulan sekali.

Ketua BEM USU Aziz Syahputra mengapresiasi dan berterimakasih kepada Rektor USU Prof. Muryanto Amin yang bersedia memberi ruang kepada mahasiswa untuk berdiskusi terkait UKT.

Dari paparan yang disampaikan Rektor USU, Aziz berkesimpulan bahwa penyusunan UKT merupakan keputusan dari pemerintah serta BEM akan mengawal implementasi UKT yang transparan dan berkeadilan seperti yang disampaikan rektor.

“Kami tentu bersedia untuk bersinergi dan membangun kolaborasi dalam diskusi serta kritik yang konstruktif untuk kemajuan USU. Kami juga sejalan dengan apa yang dikatakan rektor, bahwa prinsipnya dalam penerapan UKT ini jangan sampai ada adik-adik kita, mahasiswa baru yang putus kuliah atau tidak bisa kuliah karena terkendala UKT. Jadi kami berkomitmen akan mengadvokasi mahasiswa baru yang terbebani biaya UKT-nya agar bisa diproses secara transparan dan berkeadilan,” ujar mahasiswa Fakultas Kedokteran Gigi (FKG) ini.

Pada dialog tersebut, rektor juga memberi kesempatan kepada masing-masing perwakilan BEM tiap fakultas untuk menyampaikan pandangan dan aspirasinya.

Rektor mengaku terbuka dengan segala masukan yang ada dan berharap kualitas BEM USU dapat lebih baik dan lebih terarah pada prestasi mahasiswa, sehingga kolaborasi serta sinergitas antara rektorat dan BEM dapat terjalin serta berdampak signifikan bagi kemajuan Universitas Sumatera Utara. (A-09)